

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Kondisi Makro Perekonomian Di Indonesia

Dewasa ini perekonomian Indonesia diarahkan untuk meningkatkan sektor industri terhadap produk dalam negeri yang sesuai target bangsa Indonesia untuk mempersiapkan tinggal landas. Proses industrialisasi yang sedang dilakukan di Indonesia merupakan bagian dari rangkaian pelaksanaan GBHN dengan pembangunan sektor industri ini akan membuka lapangan kerja kepada angkatan kerja sehingga pendapatannya meningkat dan kesejahteraan serta kualitas sumberdaya manusianya meningkat. Strategi industrialisasi yang dilaksanakan adalah industri substitusi impor yang menghasilkan barang-barang baru dalam negeri yang dulunya di impor dan strategi ekspor terutama non migas untuk menambah devisa negara. System perekonomian yang dianut oleh bangsa Indonesia, menyebabkan perekonomian Indonesia tidak dapat menghindar dari perkembangan yang terjadi dalam perekonomian dunia. Dan kondisi sosial dan politik sampai saat ini membawa pengaruh baik pada pasar modal Indonesia. Dan kebijakan pemerintah dalam restrukturisasi perbankan walaupun masih jauh dari penyelesaian maupun hasil nyata tetap merupakan tindakan positif yang sudah lama dinantikan .

Semenjak adanya krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 telah memberikan dampak yang sangat luas mempengaruhi seluruh sendi-sendi perekonomian nasional. Sampai dengan akhir tahun 1998, kinerja perekonomian yang tercermin dari indikator makro menunjukkan tanda-tanda ke arah penurunan yang tajam. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kontraksi yang dalam sebesar -

13,7 % dengan harga melonjak hingga mencapai 77,6 %. Pada sisi yang lain, angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin meningkat tajam sebagai akibat dari semakin banyaknya perusahaan yang mengurangi bahkan menghentikan produksi. Krisis yang berlanjut telah mengakibatkan perbankan nasional menjadi semakin rawan. Pada sisi yang lain kepercayaan masyarakat semakin merosot, khususnya sejak pencabutan izin usaha 16 bank pada bulan November 1997. keadaan ini mengakibatkan perbankan tidak dapat beroperasi secara normal dan banyak bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Perkembangan ini telah mengakibatkan proses intermediasi perbankan terganggu sehingga memberikan dampak negatif yang sangat luas bagi perekonomian secara keseluruhan.

Diperkirakan setelah terkurasnya dana untuk perbankan, kredit pinjaman baru akan mulai mengalir kembali di awal tahun depan dan sementara itu, suku bunga pinjaman akan tetap tinggi. Dari segi investasi di pasar modal, besaran yang lebih relevan adalah suku bunga SBI yang secara gradual akan dipaksakan turun sampai level 30 % - 35 % di akhir tahun, yang kenaikannya di akhir tahun 1998 lebih ditujukan untuk meredam spekulasi rupiah. Dengan stabilnya nilai rupiah akhir-akhir ini, besar kemungkinan SBI untuk mencapai level yang lebih rendah dan lebih lanjut lagi akan membawa dampak positif baik bagi bursa saham maupun obligasi.

Menurunnya Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar -13,4 % pada tahun 1998 telah menghancurkan ekonomi bangsa, industri manufaktur hancur total, industri bangunan terhenti, dan sektor keuangan dan perbankan lumpuh. Kini masih berlanjut krismon yang terjadi di Indonesia, kondisi ini belum pulih sama sekali bahkan makin parah dan karena kurs rupiah terhadap dollar masih terus

merosot maka dampak negatifnya terhadap APBN luar biasa. Kelumpuhan sektor perbankan menjadi penyebab utama anbruknya sektor industri besar dan menengah, sehingga program rekapitalisasi yang berjalan seret sangat menghambat proses pemulihan sektor industri. Dalam kondisi sekarang ini, pasokan bantuan dana stabilisasi dari luar yang dikoordinasi IMF merupakan kunci pemulihan ekonomi Indonesia, termasuk untuk membantu menutup defisit APBN yang makin parah akibat berlanjutnya kemerosotan nilai rupiah. Harus dicatat bahwa kelambanan pemulihan ekonomi Indonesia dari krisis tidak lepas dari “persengketaan politik” khususnya antara presiden dengan DPR/MPR, karena masing-masing pihak merasa benar, maka kompromi politik tidak terjadi, dan akibatnya tidak dapat dicapai kesepakatan pula dalam kebijaksanaan dan program mengatasi krisis. Ketidakpastian ini termasuk kondisi keamanan yang juga parah, yang berdampak besar bagi kegiatan investasi baik dari dalam maupun luar negeri.

B. Perkembangan Variabel Yang Diamati

1. Variabel Dana yang diserap Oleh Perbankan

Dari tabel III.1 dapat dilihat bahwa dana masyarakat yang diserap sektor perbankan selalu mengalami kenaikan. Sumber dana dari masyarakat luas tersebut dapat berupa giro yaitu simpanan masyarakat yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah membayar lainnya atau pemindahbukuan, deposito yaitu simpanan masyarakat yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut

perjanjian, dan tabungan yaitu simpanan masyarakat yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu.

Tabel III.1
Dana Bank Menurut Jenisnya Tahun 1985-2000
(Dalam Miliar Rupiah)

TAHUN	DANA MASYARAKAT
1985	10.498,00
1986	17.174,00
1987	23.511,00
1988	29.331,00
1989	74.375,00
1990	83.153,00
1991	95.118,00
1992	114.850,00
1993	142.679,00
1994	170.460,00
1995	214.764,00
1996	281.718,00
1997	277.613,00
1998	303.524,00
1999	429.870,00
2000	400.110,00

Sumber: Statistik ekonomi dan Keuangan Indonesia, beberapa edisi

Kenaikan tersebut mengalami fluktuasi yang disebabkan oleh banyak faktor yang mempengaruhinya, terutama kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Misalnya, adanya kebijakan disektor perbankan, yaitu deregulasi Oktober 1988. kenaikan tertinggi adalah sebesar 259.11 Milyar dari tahun 1997 ke tahun 1998. hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut telah secara efektif berhasil mencapai tujuan memobilisasi dana masyarakat, sedangkan kebijakan uang ketat (*Tight Money Policy*) pada April 1990 dan gebrakan Sumarlin II pada tanggal 27 Januari 1991 yaitu penarikan deposito 12

Dengan semakin tingginya pendapatan nasional, penduduk diharapkan akan semakin tinggi minat masyarakat untuk menabung atau investasi untuk masa depan. Dalam tabel terlihat bahwa pendapatan nasional paling tinggi terjadi pada tahun 2000, sebesar Rp 199. 687,80, sedangkan pendapatan terendah terjadi pada tahun 1985 sebesar Rp 68.081,90. hal tersebut , dapat mendorong masyarakat untuk menginvestasikan dananya untuk keperluan di masa depan dan mengurangi konsumsinya di masa sekarang. Kesimpulanya bila masyarakat menginvestasikan dananya melalui perbankan semakin tinggi, maka dana pembangunan ekonomi yang terhimpun akan semakin meningkat sehingga upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhannya ekonominya tidak mengalami kendala yang berarti

3. Variabel Suku Bunga

Pemerintah dalam mengatur kondisi perbankan nasional telah menetapkan kebijakan deregulasi yang memberikan kebebasan pada masing-masing bank untuk menetapkan tingkat suku bunganya sendiri. Tentu saja dalam kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah akan selalu memberi dampak yang baik dan buruk terhadap kelangsungan perekonomian Indonesia.

Akibat yang timbul pada sisi berikutnya adalah usaha perbankan akan tumbuh secara kompetitif dalam rangka mencari dana masyarakat dan bank-bank dapat menampung dana masyarakat untuk kepentingan investasi di masa depan dan membuka lapangan usaha baru. Kemudian akibat yang dirasakan kurang begitu baik adalah dari persaingan bank dalam mencari dana dari

masyarakat akan menyebabkan timbulnya persaingan yang kurang sehat, sehingga menyebabkan masyarakat kebingungan dalam memilih bank yang mana sesuai dengan keinginan masyarakat tersebut.

Dari tabel III.3. dapat dilihat suku bunga deposito yang positif, hal tersebut berarti bahwa penyimpanan uang nasabah di bank memberikan manfaat dan nasabah tidak menderita kerugian, sebab disamping dana nasabah mendapat perlindungan (aman) dan juga dana nasabah menjadi lebih banyak karena adanya faktor suku bunga.

Tabel III.3
Perkembangan suku bunga deposito 1985-2000
(dalam %)

TAHUN	DEPOSITO 12 BULAN
1985	17,80
1986	15,20
1987	16,99
1988	17,76
1989	18,12
1990	18,12
1991	22,49
1992	18.62
1993	13,46
1994	11,87
1995	15,69
1996	16,69
1997	15,92
1998	28.29
1999	22,35
2000	15,50

Sumber: Statistik ekonomi dan keuangan Indonesia, beberapa edisi

Dalam upaya mendorong kegiatan perekonomian nasional, pemerintah Indonesia berusaha mempengaruhi suku bunga, setelah mengalami penurunan suku bunga pada tahun 1993 – 1994 sebesar 1,59% yaitu dari tahun 1993

Menyadari keadaan di atas tersebut, pemerintah orde baru yang muncul sebagai reaksi sekaligus mengoreksi keadaan yang terjadi. Dengan penetapan system dan kebijaksanaan fiskal yang berimbang dan dinamis, yang intinya adalah bahwa anggaran belanja negara tidak boleh melebihi anggaran pendapatannya. Dalam waktu yang relatif singkat sistem kebijaksanaan tersebut mampu mengendalikan inflasi sebesar 650% menjadi turun drastis sebesar 10,7 % pada tahun anggaran 1969/1970. selanjutnya selama periode 1969 sampai dengan 1994, pemerintah mampu mengendalikan laju inflasi pada tingkat rata-rata 12,6 % per tahun, yang merupakan angka yang relatif rendah bila dibandingkan dengan laju inflasi pada negara-negara berkembang yang rata-rata 31,7 % per tahun dalam kurun waktu yang sama.

Pemerintah melakukan upaya dibidang perbankan dalam negeri melalui kebijaksanaan memobilisasi dana masyarakat melalui peningkatan suku bunga simpanan dan beraneka ragam jenis deposito atau tabungan.

Akibat dari kebijaksanaan diatas laju inflasi tahunan Indonesia turun cepat pada beberapa tahun berikutnya, gejala besaran laju inflasi Indonesia dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel III.4
Laju Inflasi Nasional 1985-2000
 (dalam % per tahun)

TAHUN	LAJU INFLASI
1985	7,31
1986	6,83
1987	8,90
1988	5,47
1989	5,97
1990	9,53
1991	9,57
1992	4,94
1993	9,77
1994	9,24
1995	8,64
1996	1,53
1997	10,27
1998	77,55
1999	2,01
2000	9,35

Sumber : Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia, beberapa edisi

Dalam kurun waktu 1985-2000 terlihat bahwa laju inflasi terendah terjadi pada periode tahun 1996 yaitu sebesar 1,53 %, dan laju inflasi yang paling tertinggi terjadi pada periode tahun 1998 yaitu dengan laju inflasi sebesar 77,55 % karena disebabkan oleh merosotnya nilai tukar rupiah terhadap nilai mata uang dollar Amerika Serikat dan disebabkan pula oleh kondisi negara pada awal tahun 1997 yang terjadi krisis ekonomi yaitu ketidakpercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan di Indonesia dan terjadinya penutupan penonaktifan beberapa bank-bank swasta di Indonesia.